jurnal embrio

Vol. 3 No.1

April 2010

ISI (CONTENT)

1. Analisis Terhadap Efektifitas Kemitraan Usaha Pada Agribisnis Hortikultura: Studi Kasus Pada Beberapa Wilayah Sentra Hortikultura Di Sumatera (*The effectiveness of partnership models on horticultural, Multicase study in several Horticultural Central region in Sumatera*)
Erfit, Asdi Agustar, Elfindri dan Rudi Febriamansyah 1
2. Pemanfaatan Ampas Sagu Fermentasi Dengan *Penicillium sp* Dalam Ransum Broiler (*Utilization of sagos waste meal which fermented by Penicillium sp in broiler ration*)
Imana Martaguri, Mirnawati dan Helmi Muis 12
3. Keragaman Pertumbuhan Vegetatif dan Generatif 50 varietas Padi pada Sawah Ultisol (*Diversity characteristic of vegetative and generative of 50 varieties of rice in ultisol*)
Widodo Haryoko, Kasli, Irfan Suliansyah, Auzar Syarif dan Teguh Budi Prasetyo 17
4. Karakterisasi Padi Gogo Lokal di Bengkulu (*Characterization for local paddy in Bengkulu*)
Asfaruddin dan Sri Mulatsih, Sri Rustianti, Nurscha 26
5. Pertumbuhan dan Produksi Padi dengan Pemberian Abu Tandan Kosong Kelapa Sawit Pada Sawah Sambut (*Paddy growth and production which used ameliorant empty fruit bunch ash at peat soil*)
Kasli, Irfan Suliansyah, Auzar Syarif, Teguh Budi Prasetyo dan Widodo Haryoko 33
6. Optimalisasi Kandungan Nutrisi Tepung Limbah Pembuatan Kerupuk Sanjai melalui Fermentasi dengan Ragi sebagai bahan ransum itik alternatif (*Optimized Nutrition content of Sanjai chip's waste meal by fermentation with Yeast*)
Zasmeli Suhaemi dan Sri Mulyani 40
7. Penguasaan Lahan Dan Pohon Di 'Rimba Larangan': Upaya Melestarikan Sumber Daya Air Di Nagari Paru (*Land and Tree Tenure In 'Rimba Larangan': An Effort To Preserve Water Resources In Nagari Paru*)
Tri Martial, Helmi, Nursyirwan Effendi dan Endry Martius 45
8. Modifikasi SRI (*The System of Rice Intensification*) dengan Jarak Tanam dan Umur Bibit terhadap Pertumbuhan dan Hasil Padi Sawah (*Oryza sativa L.*) (*Modification of SRI (The System of Rice Intensification) with Distance Plant and Age Seed to Growth and Result Paddy rice field (Oryza sativa L.)*)
Yunis Marni, Auzar Syarif, dan Aswaldi Anwar..... 54

PENERBIT

Program Studi Agroteknologi dan Produksi Ternak
Fakultas Pertanian Universitas Tamansiswa
PADANG

Penguasaan Lahan Dan Pohon Di 'Rimbo Larangan': Upaya Melestarikan Sumber Daya Air Di Nagari Paru¹

(Land and Tree Tenure In 'Rimbo Larangan': An Effort To Preserve Water Resources In Nagari Paru¹)

Oleh

Tri Martial²⁾, Helmi³⁾, Nursyirwan Effendi³⁾ dan Endry Martius³⁾

¹⁾Bagian dari Disertasi Pembangunan Pertanian, Univ. Andalas, Padang

²⁾Staf Pengajar Fakultas Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara, Jl. Karya Bhakti No.34 Medan, email: tri_martial@yahoo.com

³⁾Staf Pengajar Program Pascasarjana Universitas Andalas, Padang

ABSTRACT

Rimbo larangan in nagari Paru, is a local bases forest management that can maintain its sustainability. That is relates to status of land and tree tenure as property right bases. The importance of land and tree tenure mechanism will support this system to more sustainable utilization. In consequence, research aim is to observe the status of land and tree tenure at rimbo larangan in order reaches its target above. The results indicates that utilization of ulayat nagari land as rimbo larangan on the basis of communal needs to continuity the water resources and directly benefit limited to non-wood products. Control at land and tree tenure are by society that conducted by local institutions as the local initiative. As the form of tenure institution at rimbo larangan is formalization of customary rights for communal interest, where tend to limit individual importance to forest product, this condition supports the sustainability.

Key words : Rimbo larangan, ulayat nagari land, communal, land and tree tenure, sustainability

PENDAHULUAN

Pertambahan penduduk yang semakin tinggi memunculkan kepentingan yang beragam terhadap hutan, diantaranya konversi menjadi lahan pertanian, pemanfaatan kayu, serta produk hutan lainnya. Tingginya kepentingan terhadap hutan ini menyebabkan deforestasi terjadi dalam skala luas. Hal ini mendorong kebijakan pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat lokal yang saat ini banyak dipromosikan oleh berbagai lembaga di Indonesia seperti hutan adat.

Hutan adat dikategorikan sebagai hutan negara, dimana pemerintah berhak menentukan status pengelolaan hutan tersebut. Hal ini seringkali menimbulkan konflik antara masyarakat lokal dengan pemerintah. Konflik ini berdampak terhadap keengganan masyarakat menjaga dan memelihara hutan, seperti kegagalan dalam reforestasi hutan yang berdampak buruk terhadap kualitas lingkungan dan lahan dalam jangka panjang.

Diantara berbagai penyebab kegagalan program reforestasi adalah akibat permasalahan institusi *land* dan *tree tenure* (Dorner, 1971 dan Diaz, 2003). Permasalahan utama adalah sistem penguasaan lahan dan pohon yang tidak pasti dan tidak jelas dan bahkan sering tumpang tindih sehingga sering terjadi konflik dalam pemanfaatan lahan dan sumber daya hutan. Hal ini menyangkut siapa yang memanfaatkan dan mendapatkan apa. Oleh sebab itu keberhasilan program ini menuntut pengaturan yang jelas terhadap *land* dan *tree tenure*. Pengaturan penguasaan lahan (*land tenure*) sebagai bentuk *property right* menurut Parsons (1956) menentukan keberhasilan pembangunan secara luas. Pengaturan kelembagaan *land tenure* menunjukkan kemampuan individu-individu mendapatkan akses pada keuntungan yang ada pada bagian lahan atau pada dimensi yang akan datang. Keberhasilan mengatasi konflik di atas sangat tergantung kepada kejelasan properti seseorang yang bersangkutan (Unruh, 2004).

Rimbo larangan di nagari Paru sebagai hutan adat telah eksis sejak lebih kurang 20 tahun lalu. Hal ini merupakan inisiatif masyarakat lokal dalam mengelola hutan untuk tujuan menjaga kelestarian sumber daya air bagi areal persawahan di Paru. Hak-hak pengelolaan hutan dan lahan berkaitan dengan hak kepemilikan (*property right*) di *rimbo larangan* merupakan suatu kelembagaan sebagai sistem aturan yang berlaku di masyarakat. Kondisi ini sebagai implikasi dari kelembagaan penguasaan lahan dan pohon dengan pengaturan yang tepat mampu memberikan insentif yang cocok bagi masyarakat. Sebagai suatu sistem aturan yang berlaku (*role in use*), maka

pertanyaannya adalah bagaimana dengan status penguasaan lahan dan pohon pada *rimbo larangan* sehingga dapat mendorong kepada keberlanjutannya.

METODOLOGI

Penelitian dilakukan di nagari Paru, terletak di kecamatan Sijunjung, kabupaten Sijunjung. Di sebelah Utara berbatasan dengan nagari Durian Gadang, Sebelah Timur nagari Sungai Batuang, kec. Kamang Baru, sebelah Selatan nagari Solok Ambah dan Aic Angek, dan sebelah Barat nagari Silokek. Jarak nagari Paru dengan ibukota kecamatan 27 km, ke ibukota kabupaten 33 km, dan ke ibukota provinsi 160 km. Nagari Paru terletak pada ketinggian sekitar 160 m dpl, dengan luas wilayah 24.010 Ha, dengan suhu rata-rata harian adalah 12,50 – 24,60 °C, dan curah hujan rata-rata 2078,3 mm/th.

Observasi dilakukan dengan menilai dan menggambarkan pola kelembagaan lahan (*land tenure*) dan pohon (*tree tenure*) pada *rimbo larangan* serta dinamika yang terjadi pada variabel kelembagaan lahan yaitu kepemilikan, akses atau pemanfaatan, dan manajemen atau kontrol pada lahan. Pendekatan ini mengacu kepada '*Rapid appraisal social forestry for land and tree tenure*' dalam menentukan *land* dan *tree tenure* (FAO, 2000).

Data primer didapat dari wawancara dan kuesioner dengan petani responden, serta wawancara mendalam dengan informan kunci yaitu walinagari, ketua-ketua adat, dan ketua organisasi, sedang data sekunder berupa gambaran fisik wilayah setempat dari instansi terkait. Data meliputi keragaan *land tenure*, praktek-praktek penggunaan lahan, karakteristik sosial ekonomi dan

demografi rumah tangga petani, struktur dan peranan organisasi lokal.

Analisis Deskriptif untuk membangun eksplanasi terhadap keragaan dan dinamika penguasaan lahan yang meliputi kepemilikan (*ownerships*), pemanfaatan/akses (*use/access*) dan manajemen/kontrol (*management/control*). *Rimbo larangan* merupakan hutan adat yang dikelola nagari Paru sejak tahun 80-an. *Rimbo larangan* didominasi oleh berbagai jenis pohon hutan mempunyai struktur yang kompleks seperti hutan alam. *Rimbo larangan* merupakan areal sekitar 4.000 Ha yang disepakati oleh *ninik mamak* setempat dan dilegalisasi dengan peraturan nagari

(PERNA) sebagai daerah yang dilindungi. *Rimbo larangan* dibuat sebagai respon terhadap maraknya penebangan kayu liar pada sekitar tahun 80-an yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di Paru. Hal ini ditandai dengan kegagalan panen padi akibat kekeringan dan hama penyakit. *Rimbo larangan* yang sebelumnya menjadi reservoir air bagi persawahan penduduk kritis akibat penebangan liar. Berdasarkan kondisi kritis ini *ninik mamak* berinisiatif untuk menyelamatkan areal ulayat yang menjadi sumber bagi pengairan sawah penduduk setempat. Porsi penggunaan lahan di Paru tampak pada Gambar 2.

Gambar 2. Porsi penggunaan lahan di nagari Paru

Areal *rimbo larangan* berada di Mudik Paru dan Bukit Mandi Angin. Batas-batas daerah ini hanya disepakati dari pernyataan saja: sebelah *ate* dibatasi dengan *ponten kasik*, sebelah hilir berbatasan dengan hulu Sungai Mabung, sebelah bawah dengan sawah dan sebelah *mudik* dengan *ponten tempirah*. Selanjutnya atas kesepakatan *ninik mamak* dengan walinagari disepakati menjadikan areal tersebut sebagai *rimbo*

larangan. Disepakati oleh penghulu berenam, *orang tuo nan batigo* serta aparat terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Penguasaan Lahan *Rimbo Larangan*

Sistem penguasaan lahan tidak hanya menyangkut hak kepemilikan (*ownership*), tetapi juga termasuk

pemanfaatan dan kontrol/ manajemen lahan. Hak kepemilikan (*ownership*) berhubungan dengan status kepemilikan pada lahan dan bagaimana suatu lahan dapat dikuasai. Pemanfaatan lahan berhubungan dengan siapa yang memanfaatkan lahan dan bagaimana lahan dimanfaatkan. Sedangkan kontrol berhubungan dengan siapa yang mengontrol lahan dan bagaimana lahan dikontrol. Hal ini dapat berupa adat atau kebiasaan setempat (*customary*).

Rimbo larangan adalah ulayat nagari di Paru merupakan pemilikan nagari. Lahan sebelumnya adalah merupakan lahan ulayat suku yang disepakati sebagai *rimbo larangan*. Lahan ini adalah milik beberapa suku, mayoritas suku Patopang dan Melayu, dan untuk kepentingan bersama disepakati sebagai pemilikan nagari. Lahan merupakan hutan yang dilindungi dari segala bentuk ekstraksi kayu oleh masyarakat nagari. Pemanfaatan lahan selain dijadikan sebagai *rimbo larangan*

dengan fungsi lindung, tetapi pada lahan masih dapat dilakukan mengambil kayu yang tertekan untuk kegunaan lain seperti pagar, atau kayu bakar. Di beberapa bagian *rimbo larangan* masih dibolehkan membuka kebun karet atau tanaman lain yaitu pada tempat-tempat yang dahulunya merupakan lahan budidaya masyarakat. Sedangkan pembukaan baru sama sekali tidak dibenarkan. Hal ini menurut Ramli Zein (1995) dalam masyarakat adat Minangkabau hak-hak individual diberikan berhubungan dengan tugas dan fungsinya di dalam masyarakat.

Kontrol pada ulayat nagari dilakukan pada dasarnya oleh seluruh warga yang diwakili oleh kelompok petani peduli hutan (KPPH). Kelompok ini dibentuk oleh walinagari dengan fungsi pengawasan pada *rimbo larangan*, dimana anggotanya adalah *ninik mamak*, alim ulama, *cadiek* pandai, masyarakat dan pemuda. Karakteristik penguasaan lahan di ulayat nagari Paru ini adalah pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik penguasaan lahan di ulayat nagari

Penguasaan	Ulayat nagari Paru
Kategori hak-hak kepemilikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilikan nagari pada <i>rimbo larangan</i> • Hak hanya terhadap produk non-kayu, atau tanaman tertekan
Pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> • Secara tidak langsung pada kelestarian sumber daya air • Pemanfaatan pada tanaman tertekan untuk kayu pagar, obat-obatan
Kontrol	<ul style="list-style-type: none"> • Oleh masyarakat dan KPPH

Ulayat nagari merupakan hutan konservasi. Pada ulayat nagari di Paru merupakan *rimbo larangan*, yang terletak di bagian utara nagari. Ulayat nagari merupakan aset bagi nagari. Areal lahan *rimbo larangan* sebelumnya merupakan kepemilikan ulayat Datuk Gindo Tamajo dan beberapa suku yang lain. Untuk kepentingan nagari areal ini disepakati

dengan *ninik mamak* menjadi areal hutan lindung. Jadi disini terjadi perubahan status dari ulayat suku menjadi ulayat nagari. Hal ini dapat dimengerti sebab status ulayat dalam suatu nagari dapat merupakan suatu hirarki yang bertingkat sesuai dengan kepentingannya.

Saat ini sejak areal dijadikan *rimbo larangan* disepakati berada di dalam pengaturan nagari (ulayat nagari).

Akses pada lahan dapat dilakukan oleh warga nagari Paru serta nagari sekitar Paru. Pemanfaatan areal ini sebagai *rimbo larangan* diatur dalam peraturan nagari yang merupakan legalisasi dari inisiatif lokal masyarakat nagari Paru. *Rimbo larangan* dilegalkan sesuai dengan PERNA No. 01/ 2002, tentang pelestarian hutan lindung. Sedangkan kontrol pada ulayat nagari (*rimbo larangan*) ini pada dasarnya menjadi tanggung jawab seluruh warga nagari, dimana otoritas yang mendapat legalisasi dalam hal ini adalah Badan Permusyawaratan Nagari, yang terdiri dari unsur Kerapatan Adat Nagari (KAN), *Bundo kanduang*, Pemuda, Pemerintahan Nagari (Walinagari, BPN, dan LPM), Tokoh masyarakat dan KPPH.

Dalam perkembangan selanjutnya *rimbo larangan* dibantu DEPHUT melakukan penanaman dan pemeliharaan serta membuat tapal batas. Manfaat yang diterima masyarakat Paru dari hutan lindung ini berupa manfaat secara tidak langsung, yaitu sumber air bagi areal persawahan terjamin, seluas 222 ha (Balai Penyuluhan Pertanian Deptan 2006) sehingga dapat menjaga keberadaan paru sebagai cadangan beras bagi nagari-nagari sekitar. Jenis-jenis kayu yang umumnya terdapat pada areal *rimbo larangan* ini adalah meranti, borneo, marsawa, timbalun, kawang, medang, bayur, balam, jelutung, kulit manis, karet dan lainnya.

Sistem penguasaan lahan komunal sering dimaknai sebagai pola yang tidak mendukung bagi pembangunan berkelanjutan disebabkan oleh totalitas hak-hak kepemilikan tidak dimiliki (FAO, 2002, Place dan Otsuka, 1997). Tetapi status lahan di Paru tersebut merupakan hal yang tetap. Sesuai pendapat Kato (1978) harta di

Minangkabau merupakan kepemilikan bersama dan tidak ada kepemilikan pribadi. Secara prinsip, harta berasal dari nenek moyang yang tidak dapat dicabut, terutama sekali harta tidak bergerak. Akibatnya keberadaan *rimbo larangan* dapat dipertahankan terus-menerus.

Karakteristik Penguasaan Pohon (Tree Tenure)

Pada ulayat nagari yaitu *rimbo larangan*, pemilikan pohon ada pada nagari, tetapi pemanfaatan dapat dilakukan oleh warga nagari (Tabel 2). Pemanfaatan umumnya adalah secara tidak langsung yaitu mendapatkan manfaat dari areal *rimbo larangan* dalam bentuk kelestarian sumber daya air bagi masyarakat Paru. Manfaat pohon lebih bertujuan sebagai konservasi untuk menjamin keberlangsungan produksi pertanian, sedangkan pemanfaatan langsung yang dapat dilakukan adalah mengambil kayu bakar, obat-obatan, makanan ternak, mengambil kulit manis. Pemanfaatan ini dilakukan selain produk kayu, seperti rotan dan getah. Walaupun aturannya dilarang, tetapi masih dibolehkan bagi warga Paru untuk mengambil rotan, manau, kayu kayu kecil untuk pagar tapi tidak di bagian yang terjal.

Pemanfaatan pada *rimbo larangan* selain dapat dilakukan oleh warga nagari Paru juga tidak dilarang oleh warga nagari tetangga, seperti Aie Angkek dan Aie Amo. Hal ini dilakukan sebab tidak ada aturan yang diberlakukan bahwa yang bukan anggota tidak boleh mengambil. Pada bagian lahan yang sudah pernah di olah, boleh ditanami lagi. Hal ini menunjukkan kearifan lokal dalam memanfaatkan hutan tetap dihargai sehingga manfaat bersama tidak merugikan secara pribadi.

Tabel 2. Karakteristik penguasaan pohon pada ulayat nagari Paru

Kategori hak-hak kepemilikan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan berada pada nagari • Penanaman dan pemeliharaan dilakukan KPPH
Pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk <i>Rimbo larangan</i> • Pemanfaatan secara tidak langsung kelestarian sumber daya air • Manfaat pohon untuk konservasi • Manfaat langsung dapat dilakukan kayu bakar, obat-obatan, makanan ternak, kulit manis, rotan getah (non-kayu) • Oleh warga Paru, dan warga nagari tetangga Aie Angek dan Aie Amo
Kontrol	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrol dilakukan masyarakat nagari (KAN, pemuda, <i>bundo kanduang</i>, Nagari, tokoh masyarakat, dan KPPH)

Kontrol terhadap pemanfaatan dilakukan oleh masyarakat nagari beserta KAN, pemuda, *bundo kanduang*, nagari, tokoh masyarakat dan kelompok petani peduli hutan (KPPH). Aturan kontrol terhadap *rimbo larangan* ini dinyatakan dalam PERNA No. 01 Tahun 2002 tentang hutan lindung dan keputusan walinagari Paru No. 188.47/05/Kpts-Wn-2003 tentang penetapan kelompok petani peduli hutan (KPPH) sebagai pengaman hutan pada wilayah nagari Paru kecamatan Sijunjung, kabupaten Sijunjung. Pelanggaran terhadap aturan yang telah diberlakukan maka kayu tebangan disita nagari serta dikenakan denda berupa hewan ternak atau semen yang akan digunakan bagi kepentingan nagari. Begitu juga terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penduduk nagari lain juga dikenakan aturan serupa. Tetapi jika tidak mau tunduk dengan aturan nagari maka masalahnya dibawa ke aparat berwenang.

Kelompok petani peduli hutan yang ditunjuk dalam pengamanan *rimbo larangan*, pada awalnya membuat kegiatan setiap bulan berupa penanaman dan perawatan, tetapi selanjutnya kegiatan tersebut berkurang hanya 3 bulan sekali, lalu 6 bulan sekali, seterusnya hanya mengawasi saja. Luas areal *rimbo larangan* berdasarkan

PERNA No.01 Tahun 2002 seluas 3000 Ha di Bukit Mandi Angin dan 1500 Ha di Sungai Sirah. Pengawasan yaitu terhadap tebangan ilegal pada kayu hutan, pembakaran dan pembukaan lahan baru.

Keberadaan *rimbo larangan* ini sebagai bukti menurut Ostrom (1999) bahwa pengelolaan secara komunal pada sumber daya milik umum menunjukkan bukti-bukti yang dapat tetap lestari sebab secara komunal pengguna mampu untuk membuat kelembagaan pengaturan penguasaan lahan secara otonom.

Lembaga lokal dan manajemen rimbo larangan

Lembaga-lembaga di nagari Paru yang terlibat secara langsung dengan pengelolaan sumber daya alam adalah sebagai berikut : BPN, KAN, *Bundo Kanduang*, Pemuda, LPM, KPPH, dan Kelompok Tani Tanaman pangan. Secara khusus lembaga yang dibentuk dalam mengelola *rimbo larangan* adalah KPPH. Seluruh unsur-unsur masyarakat *ninik mamak*, alim ulama, *cadiek* pandai, masyarakat dan pemuda juga terlibat dalam kelompok ini sehingga pengamanan *rimbo larangan* juga merupakan tanggung jawab seluruh warga nagari.

Dalam hubungan dengan penguasaan lahan dan pohon (sistem *tenure*), pemerintahan desa dan tata pemerintahan desa berperan dalam klaim hak-hak pada lahan dan pohon ini. Kekuatan lokal yang dicerminkan oleh kelembagaan lokal ini menentukan kelompok-kelompok yang dapat mengklaim hak-haknya. Di nagari Paru lembaga yang terlibat dalam klaim hak-

hak ini adalah lembaga adat seperti kerapatan adat nagari (KAN). KAN merupakan kesatuan *ninik mamak* yang sebenarnya merupakan representatif dari suku-kuku yang ada di Paru. KAN di nagari Paru terdiri dari 32 *ninik mamak*, yang berfungsi dalam pengurusan masalah adat. KAN ikut serta mengarahkan kebijakan nagari sekaligus juga menjadi penasehat.

Tabel 3. Karakteristik manajemen sumber daya pada di *rimbo larangan* nagari Paru

No.	Kriteria	Ulayat Nagari
1.	Kelompok pengguna	Jelas kelompok dan aktivitasnya
2.	Hubungan antara sumber daya alam dengan kelompok pengguna	Dekat pemukiman, permintaan pengguna tinggi, benefit jangka panjang, pengetahuan lokal terhadap manajemen baik
3.	Investasi pada SDA	Berupa input ke lahan rendah, pengembalian jangka panjang sebagai sumber pengairan
4.	Kecocokan antara pemanfaatan dan aturan-aturan pendapatan dan kondisi lokal	Pilihan pemanfaatan sesuai dengan kepentingan warga nagari
5.	Deteksi dan sangsi-sangsi pelanggaran	Sangsi adat dan formal diberlakukan terhadap pelanggaran aturan <i>rimbo larangan</i>
6.	Pengaturan pilihan kelompok	Atas kesepakatan nagari untuk pelestarian sebagai sumber pengairan
7.	Monitoring	Monitoring oleh lembaga nagari khusus dan umum, serta lembaga formal pemerintah (Kehutanan)
8.	Hubungan antara pengguna dengan negara	Pemanfaatan sebagai <i>rimbo larangan</i> merupakan inisiatif warga nagari. Negara memfasilitasi legalitas sebagai fungsi hutan lindung.
9.	Mekanisme resolusi konflik	Resolusi konflik diselesaikan secara adat, juga berlaku hukum formal atas pelanggaran di <i>rimbo larangan</i>
10.	Kejelasan lembaga pelaksana	Lembaga-lembaga adat dan pemerintah terlibat dalam pengaturan penguasaan lahan dan pohon

Seperti diketahui lahan di Paru adalah merupakan ulayat yang diberikan oleh Datuk-Datuk suku kepada anak kemenakannya untuk dikelola, sehingga hak terhadap lahan sebenarnya diatur oleh KAN tersebut. Tetapi aturan ini adalah sebuah kebiasaan yang tidak tertulis yang dilegalisasi oleh nagari.

Di nagari Paru, mekanisme musyawarah pembangunan yang melibatkan seluruh *ninik mamak* dalam Penguasaan Lahan ...

menentukan arah dan pelaksanaan pembangunan menjadi kekuatan yang mampu menggerakkan seluruh warga nagari terlibat di dalamnya, termasuk dalam pembangunan *rimbo larangan*. Akibatnya klaim hak-hak terhadap lahan dan pohon di Paru dapat berjalan dengan baik tanpa banyak menimbulkan konflik kepemilikan. Sehubungan dengan peranan dalam mengelola dan melindungi sumber daya tersebut

kelembagaan lokal di nagari Paru memainkan peranan yang menentukan dalam manajemen *rimbo larangan* (Tabel 3). Bentuk ulayat nagari di Paru sebagai hutan lindung atau '*rimbo larangan*' menunjukkan tujuan yang sesuai dengan manfaat kelompok pengguna yaitu warga nagari Paru untuk menjaga kelangsungan sumber air bagi mereka yang telah eksis selama lebih 20 ahun.

KESIMPULAN

1. *Rimbo larangan* sebagai reservoir air bagi nagari Paru, keberlanjutannya berkaitan dengan status penguasaan lahan dan pohon sebagai basis *property right*. Lahan merupakan kepemilikan nagari dengan pemanfaatan sebagai areal lindung atas kesepakatan sebagai kepentingan komunal untuk tujuan melestarikan sumber daya air. Kontrol oleh seluruh warga sebagai kesamaan tujuan nagari dalam pemanfaatan lahan. Kepentingan komunal merupakan dasar yang lebih utama dibandingkan kepentingan perorangan. Hal ini bukti pengelolaan hutan berbasis komunal dapat berkelanjutan.
2. Manfaat *rimbo larangan* pada pohon adalah secara tidak langsung yaitu sebagai kelestarian sumber daya air, dan secara langsung terbatas pada produk-produk non-kayu. Kontrol dilakukan oleh masyarakat nagari yang dilakukan oleh lembaga-lembaga lokal sebagai inisiatif lokal. Sebagai bentuk kelembagaan penguasaan pada *rimbo larangan* merupakan formalisasi hak-hak masyarakat adat untuk kepentingan komunal, yang membatasi

kepentingan perorangan terhadap produk hutan, sehingga mendukung keberlanjutannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dorner, P. 1971. Land Tenure Institutions. In Blase (Ed). 1971. *Institutions in Agricultural Development*. The Iowa State University Press, Ames Iowa
- Dias, H.U. 2003. Analysis of spatial distribution of tree Resources Outside the Forest in Ashanti Region, Ghana. Thesis in Int. Ins. For Geo-information Science and Earth Observation Enschede, The Netherlands
- FAO, 2000. *Community Forestry Rapid Appraisal of Tree and Land Tenure*. FAO Corporate Document Repository. www.fao.org.
- FAO, 2002. Land tenure and rural development. *FAO Land tenure studies*. FAO 2002.
- Tsuyoshi, K. 1978. Change and Continuity in the Minangkabau Matrilineal System. *Indonesia*, Vol. 25 (Apr., 1978), pp. 1-16 Published by: Southeast Asia Program Publications at Cornell University Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3350964>
- Ostrom, E. 1999. Self-Governance and Forest Resources. *Center for International Forestry Research* (CIFOR) No. 20:1-11

- Parsons, K.H. 1956. Land Reform and Agricultural Development in
Parsons, K.H., R.J. Penn dan P.M.Raup. 1956. Land Tenure.
Proc. of the Int. Con. on Land tenure and Related Problems in World Agriculture Held at Madison, Wisconsin. The University of Wisconsin Press.
- Place, F. and K. Otsuka. 1997. Population Pressure, Land Tenure and Tree Resource Management in Uganda. *EPTD Discussion Paper* No. 24. Int. Food Policy Research Int. www.ifpri.org
- Ramli Zein. 1995. *Hak Pengelolaan dalam Sistem UUPA*. PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Unruh Jon D. 2001. Viewpoint Poverty and property rights in the developing world: not as simple as we would like. *Land Use Policy* 19 (2002) 275-276